

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Taman Sari Dua. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak aktif yang terdaftar pada KPP Pratama Taman Sari Dua dengan kriteria Wajib Pajak Pribadi telah memiliki NPWP.

Metode penentuan sampel penelitian yang dipakai yaitu *Convenience Sampling*. Sampel diambil berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel.

Tabel 4.1
Jumlah Kuesioner yang dapat Digunakan

Keterangan	Jumlah kuesioner
Jumlah Kuesioner yang disebar	100
Dikurangi: Kuesioner yang tidak lengkap	13
Data yang dapat digunakan	87

Sumber: Data Primer (2012)

Aspek yang diteliti meliputi variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan (X2), dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X3), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian ini yaitu sebanyak 100 (seratus) orang yang ditemui peneliti di KPP Pratama Taman Sari Dua dari tanggal 19 November sampai 23 November 2012. Dari kuesioner yang diisi 100 responden, data yang dapat digunakan sebanyak 87 kuesioner karena tidak semua responden menjawab semua pernyataan dan terdapat responden yang tidak sesuai kriteria yaitu tidak/belum memiliki NPWP.

Jumlah ini telah sesuai kriteria sampel sebuah penelitian, Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (Sugiyono: 2011), mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian minimal 30 sampel.

Terdapat pertanyaan yang wajib diisi sebagai profil atau data responden. Dari 87 orang responden, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan, karena kebanyakan responden hanya sebagai pengantar SPT. Dengan status perkawinan lebih banyak yang sudah kawin daripada yang belum kawin. Pendidikan terakhir yang diperoleh wajib pajak yang ditemui beraneka ragam. Dan terdapat Wajib Pajak yang pernah kena denda atau sanksi pajak, juga pernah mendaftar atau membayar pajak secara online. Berikut ringkasan profil atau data responden yang dapat digunakan untuk penelitian:

Tabel 4.2
Profil Responden yang dapat Digunakan

Profil Responden	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin:		
1. Laki-laki	66	75,86%
2. Perempuan	21	24,14%
Status Perkawinan:		
1. Sudah Kawin	52	59,77%
2. Belum Kawin	35	40,23%
Pendidikan Terakhir:		
1. SMA/SMK	51	58,62%
2. D3	21	24,14%
3. S1	10	11,49%
4. Lainnya	5	5,75%
Dikenakan denda atau sanksi pajak?		
1. Pernah	24	27,59%
2. Tidak Pernah	63	72,41%
Mendaftar atau membayar pajak secara online?		
1. Pernah	17	19,54%
2. Tidak Pernah	70	80,46%

Sumber: Data Primer (2012)

Dari data responden di atas, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan. Status perkawinan yang sudah menikah juga lebih banyak dari yang belum menikah. Wajib Pajak yang berpendidikan terakhir SMA/SMK lebih dominan daripada D3, S1, dan lainnya. Juga Wajib Pajak yang pernah dikenakan denda dan pernah mendaftar atau

membayar pajak secara online lebih sedikit daripada yang tidak pernah melakukannya.

Dari Profil Responden, Status perkawinan adalah bagian dari perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status perkawinan, dan pertanyaan apakah Wajib Pajak pernah dikenakan denda atau sanksi pajak adalah bagian pengukuran dari variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan. Pendidikan terakhir yang dicantumkan pada data responden merupakan bagian yang diambil untuk mengukur tingkat pendidikan Wajib Pajak yang ditemui dalam penelitian. Dan pertanyaan apakah Wajib Pajak pernah mendaftar atau membayar pajak secara online merupakan bagian dari pengukuran variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu kuesioner digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur yang hendak akan diteliti. Dalam penelitian ini Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik uji validitas dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk yang dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.00 *for Windows*.

Tabel 4.3
Profil Responden untuk Uji Validitas dan Reabilitas

Profil Responden	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin:		
1. Laki-laki	8	80%
2. Perempuan	2	20%
Status Perkawinan:		
1. Sudah Kawin	3	30%
2. Belum Kawin	7	70%
Pendidikan Terakhir:		
1. SMA/SMK	7	70%
2. D3	2	20%
3. S1	1	10%
4. Lainnya	-	-
Dikenakan denda atau sanksi pajak?		
1. Pernah	4	40%
2. Tidak Pernah	6	60%
Mendaftar atau membayar pajak secara online?		
1. Pernah	3	30%
2. Tidak Pernah	7	70%

Sumber: Data Primer (2012)

Untuk hasil uji validitas dari pernyataan yang valid yang memiliki nilai r tabel lebih kecil dari r hitung. R tabel yang digunakan dalam penelitian ini 0,576 untuk 10 sample. Butir yang tidak valid berarti tidak mampu mengukur suatu konstruk yang akan diukur, sehingga sebaiknya dikeluarkan dari model

penelitian dan tidak dapat digunakan. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa persyaratan validitas alat ukur terpenuhi dan kuesioner dengan pernyataan yang valid dapat membentuk kuesioner yang baru sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

Tabel 4.4
Instrumen Penelitian Berdasarkan Validitas

No	Sub Variabel	Jumlah item	Valid	Tidak Valid
1	Administrasi Perpajakan Modern	12	9	3
2	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan	14	9	5
3	Tingkat Pendidikan Wajib Pajak	7	4	3
4	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak	12	10	2
Jumlah		45	32	13

Sumber : data primer (2012)

Dilihat dari Lampiran Ringkasan Hasil Uji Validitas, hasil uji menunjukkan untuk variabel Administrasi Perpajakan Modern memiliki 12 item pernyataan. Dari 12 pernyataan yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ dibanding r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 9 pernyataan dan yang memiliki r hitung $<$ dibanding r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 3 pernyataan yaitu dengan rincian pernyataan pertama (0,558), pernyataan ketiga (0,332) dan pernyataan keempat (0,058).

Dilihat dari Lampiran Ringkasan Hasil Uji Validitas, untuk variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan memiliki 14 item pernyataan. Dari 14 pernyataan yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 9 pernyataan dan yang memiliki r hitung $<$ dibanding r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 5 pernyataan yaitu dengan rincian pernyataan ke-*limabelas* (-0,520), pernyataan ke-*tujuhbelas* (0,521), pernyataan ke-*dua puluh satu* (0,413), pernyataan ke-*dua puluh tiga* (0,554), dan pernyataan ke-*dua puluh enam* (0,223).

Dilihat dari Lampiran Ringkasan Hasil Uji Validitas, untuk variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki 7 item pernyataan. Dari 7 pernyataan yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 4 pernyataan dan yang memiliki r hitung $<$ r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 3 pernyataan yaitu dengan rincian pernyataan ke-*dua puluh tujuh* (0,178), pernyataan ke-*dua puluh delapan* (0,531), dan pernyataan ke-*tiga puluh tiga* (0,344).

Dan hasil uji untuk variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki 12 item pernyataan. Dari 12 pernyataan yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ dibanding r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 10 pernyataan dan yang memiliki r hitung , dibanding r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 2 pernyataan yaitu dengan rincian pernyataan ke-*tiga puluh empat* (0,371) dan pernyataan ke-*tiga puluh lima*(-0,007).

4.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha yang dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.00 *for Windows*. Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Reabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.885	.907	32

Sumber: data primer (2012)

Hasil uji reabilitas tiga variabel X dan satu variabel Y menurut SPSS 16.00 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* $0,885 > 0,6$, yang berarti dari 32 pernyataan yang valid dapat dikatakan reliabel.

4.2.3 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011: 19) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range.

Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan statistik deskriptif nilai maksimum dan minimum dari pernyataan, juga nilai mean (rata-rata) dari jawaban responden untuk variabel-variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.6
Nilai Maksimum dan Minimum Variabel X1

Variabel	Ukuran	Nilai	Pernyataan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Maksimum	325	No.7
	Minimum	260	No.5
	Mean	29,91	

Sumber: Data Primer (2012)

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dilihat pada lampiran Data Hasil Kuesioner, dari 9 pernyataan variabel Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern pada Wajib Pajak di KPP Pratama Taman Sari, pernyataan nomor 7 “Saya (Wajib Pajak) mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan sebagai kode etik Wajib Pajak” adalah pernyataan dengan nilai tertinggi sebesar 325 yang berarti penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan pengukuran

kode etik tercapai, karena Wajib Pajak menaati peraturan sesuai kode etik. Dan pernyataan nomor 5 “Selain mendatangi langsung ke KPP, saya dapat membayar pajak secara online.” adalah pernyataan dengan nilai terendah sebesar 260 yang berarti sistem administrasi perpajakan modern dengan pengukuran Fasilitas Pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi belum maksimal, karena Wajib Pajak belum mengerti cara menggunakan fasilitas pajak secara online, sehingga banyak Wajib Pajak lebih memilih datang ke KPP langsung. Dan rata-rata jawaban responden bernilai 29,91 dari pernyataan yang diberikan.

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan

Tabel 4.7
Nilai Maksimum dan Minimum Variabel X2

Variabel	Ukuran	Nilai	Pernyataan
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan	Maksimum	341	No. 15
	Minimum	272	No. 10
	Mean	32,09	

Sumber: Data Primer (2012)

Dilihat pada lampiran Data Hasil Kuesioner, dari 9 pernyataan variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan pada Wajib Pajak di KPP Pratama Taman Sari, pernyataan nomor 15 “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sudah sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.” Adalah pernyataan dengan nilai tertinggi sebesar 341 yang berarti pengukuran variabel ini dengan Pengetahuan dan Pemahaman

tentang PTKP, PKP, dan Tarif Pajak sudah tercapai, karena pernyataan ini menunjukkan Wajib Pajak setuju PTKP sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dan pernyataan nomor 10 “Setiap warga yang sudah mempunyai penghasilan sendiri, berkewajiban mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).” adalah pernyataan dengan nilai terendah sebesar 272 yang berarti pengukuran dengan Kepemilikan NPWP belum tercapai, karena setiap warga yang sudah mempunyai penghasilan sendiri, tidak wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan rata-rata jawaban responden bernilai 32,09 dari pernyataan yang diberikan.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.8
Nilai Maksimum dan Minimum Variabel X3

Variabel	Ukuran	Nilai	Pernyataan
Tingkat Pendidikan	Maksimum	326	No.21
	Minimum	279	No.19
	Mean	13,96	

Sumber: Data Primer (2012)

Dilihat pada lampiran Data Hasil Kuesioner, dari 4 pernyataan variabel Tingkat Pendidikan pada Wajib Pajak di KPP Pratama Taman Sari, pernyataan nomor 21 “Wajib Pajak akan memikirkan lagi tentang pendidikan dan gelar yang dimiliki jika akan melakukan pelanggaran perpajakan.” adalah pernyataan dengan nilai tertinggi sebesar 326 yang

berarti variabel ini dengan pengukuran Pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan berencana sudah tercapai, Wajib Pajak akan merasa malu jika melakukan pelanggaran pajak dengan sengaja, terlebih jika dia memiliki gelar dan pendidikan yang tinggi yang merupakan kerja keras yang berencana dan disengaja untuk menaikkan tingkat kehidupannya. Dan pernyataan nomor 19 “Pendidikan lebih memudahkan Wajib Pajak belajar menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dibanding belajar dari petugas.” adalah pernyataan dengan nilai terendah sebesar 279 yang berarti pendidikan yang didapat Wajib Pajak dengan tujuan bisa menghitung sendiri pajak terutangnya belum tercapai, karena pendidikan tidak lebih memudahkan Wajib Pajak belajar menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dibanding belajar dari petugas. Dan rata-rata jawaban responden bernilai 29,91 dari pernyataan yang diberikan. Dan rata-rata jawaban responden bernilai 13,96 dari pernyataan yang diberikan.

4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.9
Nilai Maksimum dan Minimum Variabel Y

Variabel	Ukuran	Nilai	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Maksimum	334	No.25
	Minimum	311	No.30
	Mean	36,97	

Sumber: Data Primer (2012)

Dilihat pada lampiran Data Hasil Kuesioner, dari 4 pernyataan variabel Tingkat Kepatuhan pada Wajib Pajak di KPP Pratama Taman Sari, pernyataan nomor 25 “Saya mengerti dalam mengisi dan menyetorkan kembali SPT.” adalah pernyataan dengan nilai tertinggi sebesar 334 yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT sudah tercapai. Dan pernyataan nomor 30 “Tunggakan pajak meringankan Wajib Pajak dalam membayar pajak.” Adalah pernyataan dengan nilai terendah sebesar 311 yang berarti kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak belum maksimal, karena menurut mereka tunggakan pajak tidak meringankan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dan rata-rata jawaban responden bernilai 36,97 dari pernyataan yang diberikan.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011 : 160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Namun demikian dengan hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sample yang sedikit. Metode lain yang dapat digunakan

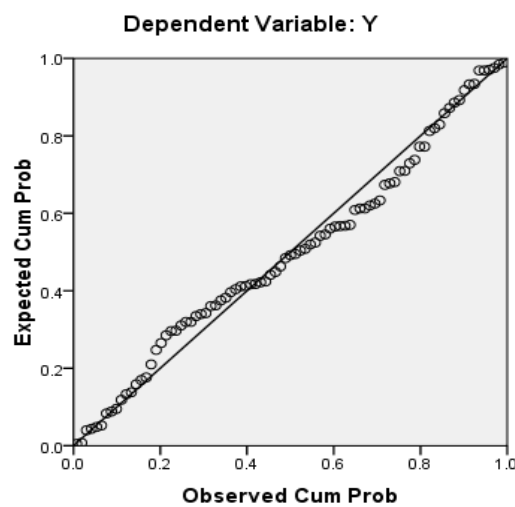
adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Deteksi dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini adalah hasil Normal P-P Plot dan Statistik One-Sampel Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas:

Gambar 4.1
Grafik Normalitas dengan P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Primer (2012)

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, maka dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.10
Tabel Uji Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.58000656
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.718
Asymp. Sig. (2-tailed)		.681

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer (2012)

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.718 dan signifikan pada 0,681, yang artinya data residual berdistribusi normal, hal ini menunjukkan hasilnya konsisten dengan uji sebelumnya.

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, (2011 : 105), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Tolerance mengukur variabilitas bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model regresi yang bebas multikolonieritas adalah yang mempunyai VIF (*Variance Inflating Factor*) = 10 dan nilai tolerance = 0,1. Untuk melihat variabel bebas dimana saja saling berkorelasi adalah dengan metode menganalisis matriks korelasi antar variabel bebas. Korelasi yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa variabel bebas tidak terdapat multilinearitas yang serius (Ghozali,2011).

Tabel 4.11
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.663	3.429		2.526	.013		
	Adm_perpajakan_modern	-.091	.156	-.070	-.585	.560	.430	2.323
	Pengetahuan_pemahaman_pajak	.662	.152	.544	4.356	.000	.391	2.558
	tingkat_pendidikan	.702	.214	.304	3.278	.002	.707	1.414

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Data Primer (2012)

Melihat hasil besaran kolerasi antar variabel independen bahwa variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan (X2) memiliki kolerasi cukup tinggi dibandingkan variabel Administrasi Perpajakan Modern (X1) dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X3). Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen.

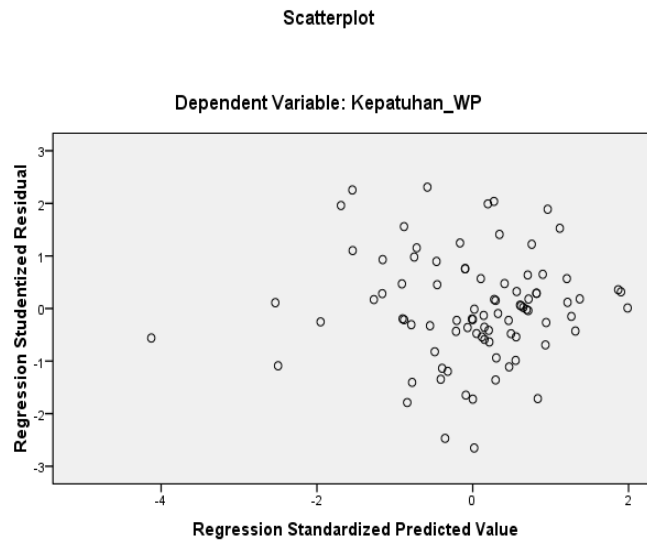
Hasil perhitungan variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel imdependen model regresi.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2011: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam model regresi secara spesifik atau dengan kata lain jika residual tidak memiliki varians yang konstan. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut. Model penelitian ini menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.2
Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Primer (2012)

Dari grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak (random), baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

4.2.5 Analisis Regresi

Uji regresi berganda dilakukan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu modal prediktif tunggal.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi untuk variabel X_1

X_1 : Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

b_2 : Koefisien regresi untuk variabel X_2

X_2 : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan

b_3 : Koefisien regresi untuk variabel X_3

X_3 : Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

e : error

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.663	3.429		2.526	.013
	Adm_perpajakan_modern	-.091	.156	-.070	-.585	.560
	Pengetahuan_pemahaman_pajak	.662	.152	.544	4.356	.000
	tingkat_pendidikan	.702	.214	.304	3.278	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Data Primer (2012)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel diatas dari hasil uji-t dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 8,663 koefisien regresi untuk variabel Administrasi Perpajakan Modern sebesar -0,091, variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan sebesar 0,662, dan variabel Tingkat Pendidikan sebesar 0,702, maka dapat ditentukan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,663 + (-0,091) X1 + 0,662 (X2) + 0,702 (X3) + e$$

Model tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 8,663 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 8,663.
2. Koefisien regresi penerapan administrasi perpajakan modern (X1) sebesar -0,091 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar -0,091 Hal ini menunjukkan bahwa jika penerapan sistem administrasi perpajakan modern di tingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Koefisien pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan (X₂) sebesar 0,662 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan terhadap WP Pribadi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu sendiri.
4. Koefisien tingkat pendidikan wajib pajak (X3) sebesar 0,702 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1%

dalam tingkat pendidikan wajib pajak terhadap WP Pribadi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu sendiri.

4.2.6 Uji Hipotesis

4.2.6.1 Uji t

Yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi (α) 5% dengan sampel (n).

1. Kriteria hipotesis

H_0 ; $\beta < 0$; tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a ; $\beta > 0$; ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Kriteria pengujian:

Jika nilai t hitung $<$ t tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Jika nilai t hitung $>$ t tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Untuk nilai t-tabel untuk n 87 diperoleh yaitu sebesar 1.987. Hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.13
Uji Parsial (t-test)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.663	3.429		2.526	.013
	Adm_perpajakan_modern	-.091	.156	-.070	-.585	.560
	Pengetahuan_pemahaman_pajak	.662	.152	.544	4.356	.000
	tingkat_pendidikan	.702	.214	.304	3.278	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Data Primer (2012)

a. Hipotesis Pertama

H1: Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki nilai $t = -0,585$ dengan probabilitas signifikan sebesar 0,560. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian berarti H_0 diterima dan Hipotesis ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, atau hipotesis pertama (H1) tidak terbukti.

b. Hipotesis Kedua

H2 : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki nilai $t = 4,356$ dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian berarti bahwa H_0 ditolak dan Hipotesis diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, atau hipotesis kedua (H2) terbukti.

c. Hipotesis Ketiga

H3 : Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki nilai $t = 3,278$ dengan probabilitas signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian berarti bahwa H_0 ditolak dan Hipotesis diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, atau hipotesis ketiga (H3) terbukti.

4.2.6.2 Uji F

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen (Y) secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3).

Ho: Tidak ada pengaruh antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan wajib pajak pribadi.

H4: Ada pengaruh antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan wajib pajak pribadi.

Hasil uji F dapat dilihat dari output pada tabel ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 4.14
Uji Pengaruh Simultan (F Test)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1758.921	3	586.307	26.976	.000 ^a
	Residual	1803.976	83	21.735		
	Total	3562.897	86			

a. Predictors: (Constant), tingkat_pendidikan, Adm_perpajakan_modern, Pengetahuan_pemahaman_pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Data Primer (2012)

Uji pengaruh simultan (F-test) sebesar 26.976 dan signifikansi sebesar 0.000 dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang berarti variabel independen yaitu sistem penerapan administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem administrasi perpajakan belum dikatakan dimodernisasi di KPP Pratama Taman Sari Dua. Hasil uji t untuk variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan nilai t hitung nya -0,585 sedangkan t tabel $n = 87$ yaitu 1,987. Jadi $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai t hitung -0,585 pada variabel ini memiliki tingkat signifikan 0,560. Dengan nilai signifikan yang didapat sebesar 0, 560 berarti nilai signifikan tersebut lebih besar dibandingkan 0,05 atau 5%. Yang berarti Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dalam kesimpulan penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh:

1. Model KPP Pratama itu sendiri baru dikembangkan pada tahun 2002, sehingga perlu banyak sosialisasi yang lebih banyak mengenai penerapannya.
2. Penggunaan teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakannya masih merendah. Terlihat pada pernyataan nomor 5 yang menjadi pernyataan dengan nilai terendah dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya. Oleh karena itu dikemudian hari perlu dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi internet guna mempermudah transaksi perpajakannya.

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil- kecilnya.

Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, dan Budaya Organisasi. Di penelitian

ini ada beberapa pengukuran untuk sistem administrasi perpajakan modern yang membuat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya.

Pengukuran pertama yaitu perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP. Kurang banyaknya petugas pajak menjadikan kurang maksimalnya peran dari struktur organisasi KPP. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak sudah baik. Petugasnya ramah dan dapat memberikan informasi yang jelas dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang datang. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi sudah cukup baik, namun dari masyarakat masih banyak yang belum mengerti menggunakan fasilitas tersebut. Dari segi kode etik, petugas sudah memiliki etika yang baik, seperti merahasiakan data pribadi wajib pajak dan melayani dengan ramah sehingga membuat wajib pajak merasa nyaman dan mematuhi tiap peraturan yang ada.

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini untuk variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan nilai t hitungnya 4,356 pada tingkat signifikan 0.000, sedangkan nilai t tabel 1,987. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dibandingkan 0,05 atau 5%. Yang berarti H_0 ditolak, dan hipotesis kedua (H_2) diterima, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Taman Sari Dua.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis yang meneliti faktor-faktor kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian tersebut memiliki nilai t hitung $3,865 > t$ tabel $1,663$, maka H_0 ditolak. Yang artinya Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis pada tahun 2010, variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dilakukan dengan beberapa pengukuran. Kepemilikan NPWP, di KPP ini wajib pajak yang sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memiliki NPWP adalah salah satu kewajiban juga sekaligus hak dari tiap masyarakat. Wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan dan bisa melaksanakannya dengan baik.

Wajib pajak juga sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakannya. Terlihat dari batas waktu yang diberikan untuk melaporkan dan membayarkan pajak, banyak wajib pajak

yang melapor pada saat *deadline* tersebut. Masih banyak yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, jadi wajib pajak belum bisa menghitung sendiri berapa pajak yang harus dia bayarkan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi dan training dari petugas pajak.

4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini untuk variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki nilai t hitung 3,278 pada tingkat signifikan 0.002, sedangkan nilai t tabel 1,987. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dibandingkan 0,05 atau 5%. Yang berarti H_0 ditolak, dan hipotesis ketiga (H_3) diterima, yaitu di KPP Pratama Taman Sari Dua tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari data responden dalam penelitian ini, jumlah Wajib Pajak yang berpendidikan S1 lebih kecil daripada Wajib Pajak yang berpendidikan D3 maupun SMA/SMK. Namun nilai jawaban responden yang berpendidikan S1 rata-rata lebih besar daripada besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat, akan lebih mendorong kepatuhannya dalam mentaati kewajiban perpajakannya.

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan

semakin tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Semakin luas pemahaman tersebut maka membuat lebih mendorong Wajib Pajak mentaati kewajibannya mematuhi peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Budi Riharjo (2007) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut memiliki hasil pengujian t-test diperoleh t hitung 3,444 dimana angka tersebut diikuti nilai signifikan 0,001 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Ikhsan (2007) dalam penelitian yang dilakukannya bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.4 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan Modern, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan, dan

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai hasil uji F sebesar 26,976 yang berarti secara simultan (bersama-sama) ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh 26,97% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor variabel lain.

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha dengan mengutip Ott (2001) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sistem administrasi perpajakan dimodernisasi dan masyarakat bisa memahami cara kerja administrasi tersebut, juga mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dengan pendidikan yang maksimal akan lebih mendorong Wajib Pajak mematuhi kewajibannya untuk menyetor dan membayar pajak.